

**PRAKTEK KERJA LAPANG PADA SUB BAGIAN PROGRAM  
DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN  
LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR**

**PRAKTEK KERJA LAPANG  
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN  
JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERIKANAN**

Oleh :  
**PUJI LESTARI RAHAYUNINGSIH**  
0510840056



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2008**

**PRAKTEK KERJA LAPANG PADA SUB BAGIAN PROGRAM  
DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN  
LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR**

**PRAKTEK KERJA LAPANG  
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN  
JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERIKANAN**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana**

Oleh :  
**PUJI LESTARI RAHAYUNINGSIH**  
0510840056



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2008**

**PRAKTEK KERJA LAPANG**

**PRAKTEK KERJA LAPANG PADA SUB BAGIAN PROGRAM  
DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN  
LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR**

Oleh :  
**PUJI LESTARI RAHAYUNINGSIH**  
0510840056

telah dipertahankan di depan penguji  
pada tanggal 26 November 2008  
dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui,  
Dosen Pembimbing**

**(ZAINAL ABIDIN, SPi)**  
NIP 132 300 234  
Tanggal : 26 November 2008

**Dosen Penguji**

**(Dr.Ir. HARSUKO RINIWATI, MP)**  
NIP 131 879 039  
Tanggal : 26 November 2008

**Mengetahui  
Ketua Jurusan**

**(Ir. MAHENO SRI WIDODO, MS)**  
NIP 131 471 522  
Tanggal : 26 November 2008

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
Jl. Veteran Malang-65145 Telp. (0341) 553512,551611  
Psw. 215,216 Fax. (0341) 557837**

**LEMBAR REVISI PKL**

**NAMA : PUJI LESTARI R.**  
**NIM : 0510840056**  
**PROGRAM STUDI : SOSIAL EKONOMI PERIKANAN**  
**JUDUL : PRAKTEK KERJA LAPANG PADA SUB BAGIAN  
PROGRAM DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN  
PETERNAKAN KABUPATEN LAMONGAN  
PROPINSI JAWA TIMUR**  
**TANGGAL UJIAN : 26 NOVEMBER 2008**

No	HALAMAN	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	KETERANGAN
1.	4	Pentingnya kelembagaan pada Latar Belakang belum ada.	Pentingnya kelembagaan pada Latar Belakang sudah ada.	Sudah ditambahkan.
2.	5	Tujuan PKL: untuk mengetahui siklus kebijakan DPKP Kab. Lamongan dalam bentuk program kerja.	Tujuan PKL: untuk mengetahui dan mempelajari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja DPKP Kab. Lamongan.	Sudah diperbaiki.
3.	5	Kegunaan PKL: untuk masyarakat, praktikan, perguruan tinggi dan akademisi, pemerintah, investor.	Kegunaan PKL: untuk masyarakat, peneliti, pemerintah, investor.	Sudah diperbaiki
4.	7	Analisis PKL tidak dicantumkan sebagai bentuk partisipasi aktif.	Analisis SWOT dicantumkan sebagai bentuk partisipasi aktif.	Sudah dimasukkan.
5.	16, 19, 22, 23, 24, 25	Margin pada tabel dengan kolom berjumlah kurang dari lima tidak dihabiskan.	Margin pada semua tabel dihabiskan.	Sudah diperbaiki.
6.	17	Kata asing tidak ditulis miring ( <i>Statis Location Quotion, Dynamic Location Quotion, production</i> )	Kata asing ditulis miring ( <i>Statis Location Quotion, Dynamic Location Quotion, production</i> )	Sudah diperbaiki.

7.	39	oriented, ability to pay). Foto dengan bahasan belum dikaitkan dan diletakkan dalam Lampiran.	<i>oriented, ability to pay).</i> Foto dengan bahasan dikaitkan dan diletakkan dalam pembahasan.	Sudah diganti.
8.	31	Susunan organisasi diletakkan dalam Lampiran dan tidak dimasukkan dalam analisis SWOT.	Susunan organisasi diletakkan dalam gambaran umum DPKP Kab. Lamongan dan dimasukkan dalam analisis SWOT.	Sudah diperbaiki.

Dosen Penguji

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

(Dr.Ir. HARSUKO RINIWATI, MP)

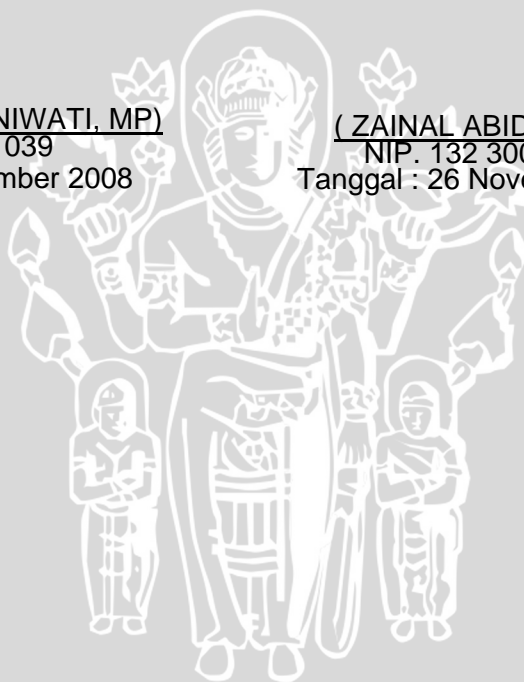
NIP 131 879 039

Tanggal : 26 November 2008

( ZAINAL ABIDIN, SPi )

NIP. 132 300 234

Tanggal : 26 November 2008



- Bapak Yoyok, pegawai di laboratorium/klinik kesehatan ikan dan hewan di DPKP Kabupaten Lamongan yang rela mengantar jemput saat pelaksanaan PKL.
- Seluruh pegawai DPKP Kabupaten Lamongan, terutama di Sub Dinas Pengembangan SDM dan Penyuluhan atas keramahan dan segala bantuan yang diberikan saat pelaksanaan PKL.
- Penghuni kos BSGV 29B, terutama Ika, Kawan-kawan SEP '05 terutama Dewi dan AQUA\_nist serta *Cabul's Family* yang senantiasa memberikan dukungan dan hiburan selama proses.
- Semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan PKL ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Penulis juga berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan atau memerlukannya.

Malang, 15 Desember 2008  
Penulis

Puji Lestari R.

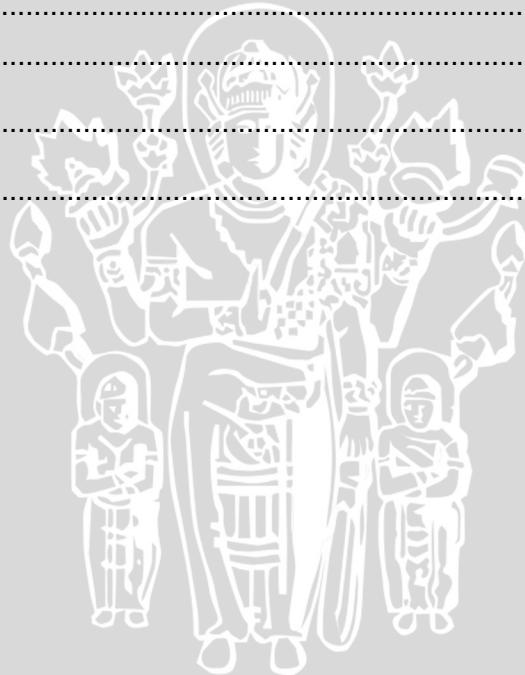
Masukan/tuntutan/masalah yang mereka berikan kepada pemerintah disaring antara 40-60% dari total yang ada. Kegiatan/program yang telah disetujui selanjutnya diimplementasikan. Dari rencana lima tahunan yang disusun oleh DPKP Kabupaten Lamongan, sampai tahun 2007 DPKP Kabupaten Lamongan telah mencapai dua sasaran, yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan dan meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dengan program pengembangan peternakan dan perikanan melalui kegiatan optimalisasi produksi hasil ternak dan optimalisasi produksi hasil perikanan.

Evaluasi terhadap program/kegiatan dilakukan melalui analisa capaian kinerja sesuai dengan perumusan DPKP Kabupaten Lamongan. Pada tahun anggaran 2007, DPKP Kabupaten Lamongan analisa kinerjanya dikatakan sangat berhasil karena hasil pengukuran ordinalnya mencapai angka 100%.

Dari tabel SWOT dapat diketahui bahwa Kabupaten Lamongan sesungguhnya memiliki potensi yang besar di bidang perikanan, kelautan dan peternakan. Namun, sampai saat ini kontribusi yang diberikan terus mengalami fluktuasi, salah satunya karena belum ditangani secara optimal. Untuk itulah perlu adanya suatu program dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki. Pengelolaan yang optimal juga dapat dilakukan melalui pembentukan dinas perikanan dan kelautan secara *independent* atau melakukan pembagian tugas sehingga antara sektor perikanan dan peternakan tidak tercampur. Selain itu, keterlibatan seluruh stakeholder terkait mutlak diperlukan dalam perumusan kebijakan/program sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak terkesan *top-down*.



3.5.2 Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan .....	23
IV. KEADAAN UMUM DPKP KABUPATEN LAMONGAN.....	27
4.1 Pembentukan DPKP Kab. Lamongan .....	27
4.2 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi DPKP Kab. Lamongan .....	28
4.3 Susunan Kepegawaian DPKP Kab. Lamongan .....	32
4.4 Sarana dan Prasarana .....	33
V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	34
5.1 Kerangka Proses Kebijakan .....	34
5.2 Perencanaan Program Kerja DPKP Kab. Lamongan.....	35
5.3 Pelaksanaan Program Kerja DPKP Kab. Lamongan .....	38
5.4 Evaluasi Program Kerja DPKP Kab. Lamongan.....	42
VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....	59
6.1 Kesimpulan.....	59
6.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN .....	65





## RINGKASAN

**PUJI LESTARI R, Praktek Kerja Lapang pada Sub Bagian Program Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur (Dibawah bimbingan Zainal Abidin, SPi).**

---

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Timur yang memiliki potensi besar dari sektor perikanan. Dari total produksi ikan di Jawa Timur, Kabupaten Lamongan mampu memberikan kontribusi sebesar 15,25% atau sekitar 65.874,984 ton, senilai kurang lebih Rp 446 milyar. Sehingga Kabupaten Lamongan mampu menghaasilkan produksi ikan nomor 3 (tiga) terbesar di Jawa Timur setelah Kabupaten Sumenep dan Probolinggo. Potensi perikanan yang sangat tinggi di Kabupaten Lamongan ini seharusnya mampu menjadikan perikanan sebagai sektor unggulan. Namun, berdasarkan KPDE Lamongan (2007) disebutkan bahwa peran sektor primer (khususnya pertanian dan perikanan) menunjukkan kecenderungan semakin menurun. Padahal sektor tersier (khususnya perdagangan, hotel, dan restoran serta jasa) menunjukkan kecenderungan meningkat. Tentunya diperlukan suatu program yang lebih baik dari pihak terkait, khususnya Sub Bagian Program Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan dalam membangun Perekonomian Kabupaten Lamongan dalam membuat kebijakan/program di bidang perikanan.

Kegiatan Praktek Kerja Lapang ini di Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan (DPKP Sub Bagian Program, Sub Dinas Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Penyuluhan) Kabupaten Lamongan pada bulan Juli 2008. Praktek kerja lapang dilaksanakan guna mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dalam bentuk program kerja DPKP Kabupaten Lamongan, baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data praktek kerja lapang ini adalah metode pengamatan terlibat/partisipasi aktif, pengamatan biasa/observasi, dan wawancara serta pemeriksaan dokumentasi (studi dokumenter). Jenis dan sumber data yang dikumpulkan meliputi data primer dari hasil observasi/ wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Dinas Pengembangan SDM dan Penyuluhan, Pegawai DPKP Kabupaten Lamongan, dan lain dan data sekunder berasal dari Rencana Strategis DPKP Kabupaten Lamongan tahun 2006, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2007.

Berdasarkan Praktek Kerja Lapang diketahui bahwa DPKP Kabupaten Lamongan telah melakukan usaha untuk menyelesaikan permasalahan di bidang perikanan, kelautan dan peternakan di Kabupaten Lamongan yang tercermin melalui kebijakan/program/kegiatan. Langkah yang dilakukan oleh DPKP Kabupaten Lamongan sejauh ini masih sesuai dengan proses kebijakan yang dikemukakan oleh Jones (1991), yaitu pemberian masalah/tuntutan/prioritas dari kelompok nelayan/pembudidaya ikan/peternak ke pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan proposal/program/pemberian anggaran dan diimplementasikan melalui suatu kegiatan hingga akhirnya dievaluasi.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Dzat yang memiliki kuasa atas segala hal. Atas kehendak-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Laporan Praktek Kerja Lapangan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang.

Praktek Kerja Lapangan ini berisikan tentang siklus kebijakan dalam bentuk program kerja Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Dengan terselesaikannya laporan Praktek Kerja Lapangan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

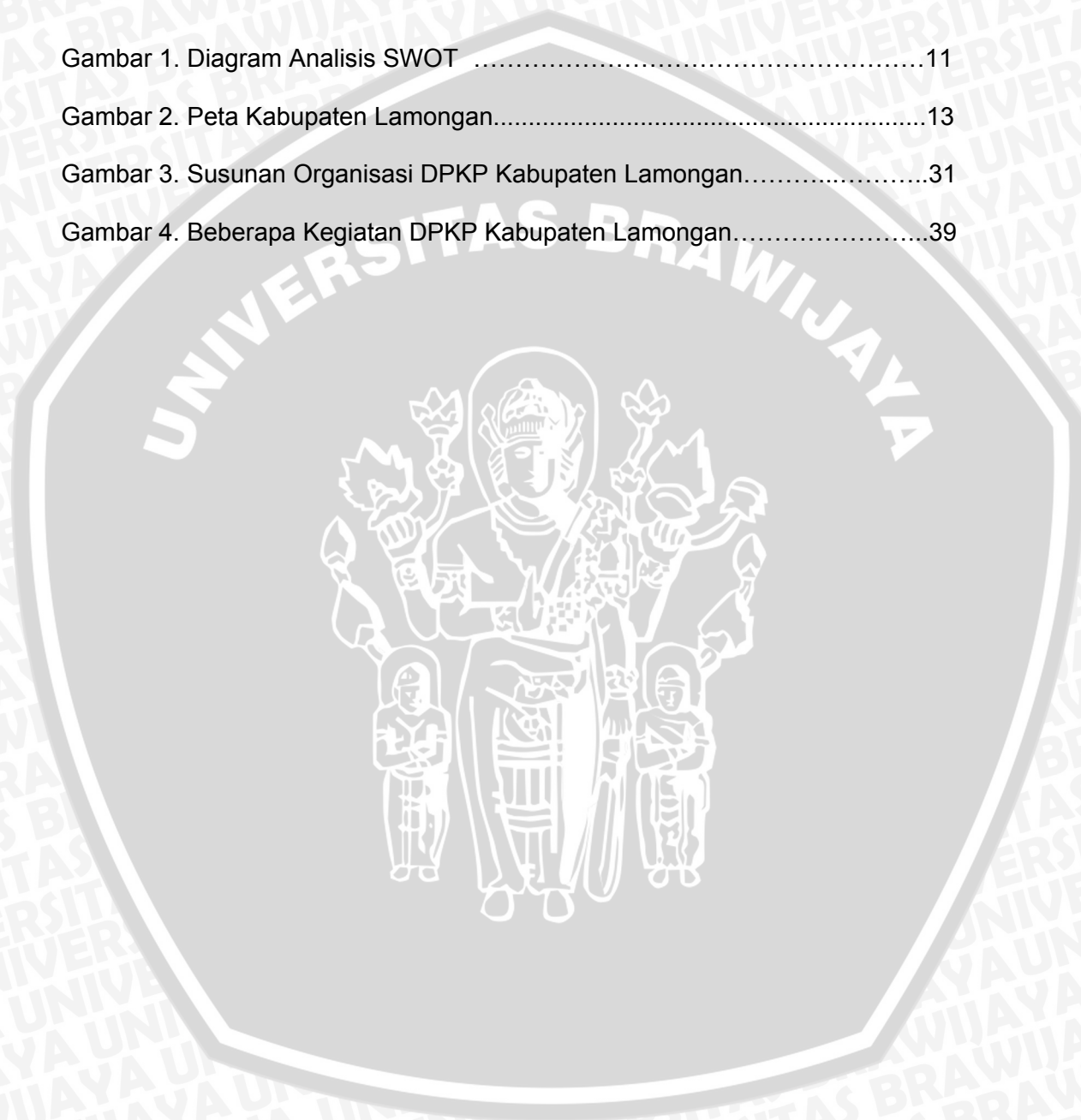
- Keluarga besar, terutama Ayah, Ibu dan adik tercinta yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk.
- Bapak Zainal Abidin, SPI selaku Dosen Pembimbing PKL.
- Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MS selaku dosen penguji atas masukan yang diberikan.
- Kepala DPKP Kabupaten Lamongan yang telah memberikan ijin pelaksanaan PKL.
- Bapak Ir. Wardoyo, MMA selaku kepala Sub Dinas Pengembangan SDM dan Penyuluhan DPKP Kabupaten Lamongan atas segala kemudahan yang telah diberikan saat pelaksanaan PKL.
- Kepala Sub Bagian Program DPKP Kabupaten Lamongan untuk data-data yang diperlukan dalam PKL.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN .....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Maksud dan Tujuan .....	4
I.2.1 Maksud .....	4
I.2.2 Tujuan.....	5
I.3 Kegunaan .....	5
I.4 Tempat dan Waktu .....	5
II. METODE PELAKSANAAN PKL .....	6
2.1 Metode.....	6
2.2 Jenis dan Sumber Data .....	9
2.3 Analisis Data.....	10
III. KEADAAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN.....	13
3.1 Letak Geografi dan Topografi Kab. Lamongan .....	13
3.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kab. Lamongan.....	15
3.3 Demografi Kab. Lamongan.....	15
3.4 Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Kab. Lamongan .....	16
3.5 Potensi dan Pengelolaan Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan ..	21
3.5.1 Kondisi Saat Ini.....	21

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Analisis SWOT .....	11
Gambar 2. Peta Kabupaten Lamongan.....	13
Gambar 3. Susunan Organisasi DPKP Kabupaten Lamongan.....	31
Gambar 4. Beberapa Kegiatan DPKP Kabupaten Lamongan.....	39



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Data Kepegawaian berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan serta Jenjang Pendidikan di DPKP Kabupaten Lamongan.....	65
Lampiran 2. Sarana dan Prasarana pada DPKP Kabupaten Lamongan .....	67
Lampiran 3. Rencana Strategis DPKP Kabupaten Lamongan tahun 2006-2010.....	68
Lampiran 4. Rencana Strategis DPKP Kabupaten Lamongan Tahun 2007.....	73
Lampiran 5. Pengukuran Capaian Sasaran Program Kerja DPKP Kabupaten Lamongan Tahun 2007.....	74



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk salah satu negara bahari sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia. Luas perairannya mencapai sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> atau 75% dari total luas wilayahnya. Wilayah perairan ini tersebar dalam bentuk pulau, berjumlah sekitar 17.506 pulau yang dikelilingi oleh 81.000 km garis pantai (Dahuri, 2002).

Dengan luas perairan yang mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> tersebut, Dahuri, Rokhmin (2002) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki kelimpahan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sejumlah keunggulan komperatif dan kompetitif yang sangat tinggi. Berdasarkan perhitungan harga di tingkat produsen tahun 2000, nilai produksi ikan tangkap mencapai Rp 18,46 triliun. Untuk benih ikan laut mencapai Rp 8,07 milyar, sedangkan untuk budidaya laut yang meliputi ikan, rumput laut, kerang-kerangan, tiram, teripang, mutiara mencapai produksi senilai Rp 1,36 triliun.

Selain itu diperkirakan terdapat 35.000 species biota laut yang memiliki potensi sebagai penghasil obat-obatan, sementara yang dimanfaatkan baru 5.000 species. Potensi wisata bahari Indonesia pun memiliki nilai yang cukup tinggi. Di Indonesia terdapat 241 Daerah Tingkat II yang memiliki pesisir. Dari sektor pertambangan, laut Indonesia menyimpan potensi kekayaan yang cukup besar berupa minyak dan gas bumi. Diperkirakan Indonesia memiliki cadangan minyak bumi yang dapat menghasilkan 84,48 milyar barel minyak. Dari cadangan minyak yang ada tersebut, baru 9,8 milyar barel yang diketahui pasti dan sudah dimanfaatkan, sedangkan sisanya sebesar 74,68 milyar barel masih berupa

## II. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANG

### 2.1 Metode

Patilima, Hamid (2005) menyebutkan bahwa data dan informasi harus merupakan fakta agar dapat dipergunakan dalam penalaran. Dalam kedudukannya yang pasti, bahan-bahan itu siap digunakan sebagai eviden. Eviden merupakan semua fakta yang ada, semua kesaksian, semua otoritas yang dihubungkan untuk membuktikan suatu kebenaran dari suatu objek yang diteliti. Sebab itu perlu diadakan pengujian-pengujian melalui cara-cara tertentu. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data praktek kerja lapang ini adalah metode pengamatan terlibat/partisipasi aktif, metode pengamatan biasa/observasi, dan wawancara serta pemeriksaan dokumentasi (studi dokumenter).

#### a. Metode pengamatan terlibat/partisipasi aktif

Metode pengamatan terlibat/partisipasi aktif merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada, sesuai dengan maknanya dengan yang diberikan atau dipahami oleh warga yang ditelitinya. Kegiatan terlihat bukan hanya mengamati gejala-gejala yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diteliti, tetapi juga melakukan wawancara, mendengarkan, merasakan dan melakukan batas-batas tertentu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan (Patilima, 2005).

Pada praktek kerja lapang ini, pengamatan terlibat/partisipasi aktif dilakukan dengan mengikuti dan berperan serta dalam kegiatan Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, misalnya mengkomputerisasi

### III. KEADAAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

#### 3.1 Letak Geografi dan Topografi Kabupaten Lamongan

Praktek kerja lapang ini dilaksanakan di Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Timur yang memiliki luas 1.812,8 Km<sup>2</sup> atau ± 3,7% dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara geografis terletak pada 6°51'54" – 7°23'6" LS dan 112°4'41" – 112°35'45" BT. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km<sup>2</sup>, apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut.



Gambar 2. Peta Kabupaten Lamongan



#### IV. KEADAAN UMUM DPKP KABUPATEN LAMONGAN

##### 4.1 Pembentukan DPKP Kabupaten Lamongan

Era reformasi menjadi salah satu masa dimana seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami suatu perubahan. Orientasi pembangunan yang terkonsentrasi pada wilayah daratan di era Orde Baru mengakibatkan tak tersentuhnya sektor perikanan. Hingga akhirnya Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir.Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Kementerian Eksplorasi Laut menjadi Kementerian Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1 Kerangka Proses Kebijakan

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam Jones (1991) mendefinisikan kebijakan sebagai keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt juga mengamati bahwa kebijakan dibedakan dari tujuan-tujuan kebijakan, niat-niat kebijakan dan pilihan-pilihan kebijakan. Selanjutnya mereka menjelaskan perbedaan masing-masing komponen kebijakan tersebut, yaitu :

- Niat (*intention*) : tujuan-tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan
- Tujuan (*goals*) : keadaan akhir yang hendak dicapai
- Rencana atau usulan (*plans or proposals*): cara yang diterapkan untuk mencapai tujuan
- Program : cara yang disahkan untuk mencapai tujuan
- Keputusan atau pilihan (*decisions or choices*) : tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program
- Pengaruh (*effect*) : dampak program yang dapat diukur (yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, yang bersifat primer ataupun sekunder).

Jones, C.O (1991) menunjukkan proses kebijakan dalam suatu bentuk kerangka analisa. Kerangka analisa kebijakan tersebut dapat dilihat dalam tabel 10.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapang di Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :

- a. Secara umum DPKP Kabupaten Lamongan telah melakukan usaha untuk menyelesaikan permasalahan di bidang perikanan, kelautan dan peternakan di Kabupaten Lamongan yang tercermin melalui kebijakan/program/kegiatan. Langkah yang dilakukan oleh DPKP Kabupaten Lamongan sejauh ini masih sesuai dengan proses kebijakan yang dikemukakan oleh Jones (1991), yaitu pemberian masalah/tuntutan/prioritas dari kelompok nelayan/pembudidaya ikan/peternak ke pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan proposal/program/pemberian anggaran dan kemudian dilaksanakan melalui suatu kegiatan hingga akhirnya dilakukan evaluasi.
- b. Formulasi kebijakan biasanya dimulai dengan pemberian usulan/masukan kelompok nelayan/pembudidaya ikan/peternak di masing-masing desa/kecamatan kepada Dinas. Pengajuan ini dilakukan satu tahun sebelum dikirim. Selanjutnya usulan tersebut disesuaikan dengan RPJM, Renstra Daerah, Renstra SKPD, dan Renstra Dinas (lima tahunan) lalu dijabarkan tiap tahunnya. Masukan/tuntutan/masalah yang mereka berikan kepada pemerintah disaring antara 40-60% dari total yang ada.
- c. Kegiatan/program yang telah disetujui selanjutnya diimplementasikan. Dari rencana lima tahunan yang disusun oleh DPKP Kabupaten Lamongan, sampai tahun 2007 DPKP Kabupaten Lamongan telah mencapai dua sasaran, yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan dan

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. **Administrasi Pemerintahan**. <http://www.bappedalamongan.go.id/>. 17 Juli 2008, 15.20 WIB.
- Black, J.A. dan Dean J.C. 1999. **Metode dan Masalah Penelitian Sosial**. PT Refika Aditama. Bandung.
- Cooper, D.R. dan William C.E. 1996. **Metode Penelitian Bisnis Jilid I**. Erlangga. Jakarta.
- Dahuri, Rokhmin. 2002. **Reorientasi Pembangunan Berbasis Kelautan**. [www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/r/rokhmin-dahuri/wawancara.shtml](http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/r/rokhmin-dahuri/wawancara.shtml). 15 Januari 2008, 08.08 WIB.
- Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan. 2006. **Rencana Strategis**. Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan. Lamongan.
- 
- \_\_\_\_\_. 2006. **Laporan Kegiatan Subdin Pengembangan SDM dan Penyuluhan**. Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan. Lamongan.
- Dzulfikar, Rizka. 2007. **Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan, Jawa Timur**. Universitas Brawijaya, Malang.
- Gibson J.L., dkk. 1991. **Organisasi Jilid 1**. Erlangga. Jakarta.
- Jones, C.O. 1991. **Pengantar Kebijakan Publik ( Publik Policy)**. CV Rajawali. Jakarta Utara.
- KPDE Lamongan. 2007. **Geografi Kabupaten Lamongan**. <http://www.lamongan.go.id.index.cfm>. 27 April 2008, 16.20 WIB.
- 
- \_\_\_\_\_. 2007. **Potensi Daerah Lamongan**. <http://www.lamongan.go.id.index.cfm>. 17 Juli 2008, 15.20 WIB.
- Masfuk. 2008. **Membangun Entrepreneurship Government dalam Upaya Memacu Pembangunan Daerah di Kabupaten Lamongan**. [http://kormonev.menpan.go.id/ebhtml/joomla/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&gid=186](http://kormonev.menpan.go.id/ebhtml/joomla/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=186). 25 April 2008, 10.27 WIB.
- Media Jatim Menuju E-Government. 2003. **Sejarah Hari Jadi Lamongan**. <http://www.jatim.go.id>. 25 April 2008, 10.00 WIB.

## LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Kepegawaian berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan serta Jenjang Pendidikan di DPKP Kabupaten Lamongan

No	Jabatan Struktural	Jumlah	Pangkat/Ruang	Jumlah	Pendidikan Formal	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1	Pembina Tk I (IV/b)	1	S-2	1
2.	Kabag TU	1	Pembina (IV/a)	1	S-1	1
3.	Ka Sub Din	4	Pembina Tk I (IV/b)	3	S-2	3
			Pembina (IV/a)	1	S-1	1
4.	Ka Subag	3	Penata Tk I (III/d)	1	S-1	1
			Penata (III/c)	2	SMA	1
					S-1	1
5.	Kepala Seksi	13	Pembina (IV/a)	5	S-2	2
					S-1	3
			Penata Tk (III/d)	4	S-2	2
					D-III	1
					SMA/STM	1
			Penata (III/c)	3	S-2	1
					S-1	2
			Penata Muda Tk I (III/b)	1	S-1	1
6.	KCD dan UPT	11	Penata Tk I (III/d)	2	S-2	1
					D-III	1
			Penata (III/c)	7	S-2	1
					S-1	3
					D-III	1
					SMA	1
					SNAKMA	1
			Penata Muda Tk I (III/b)	2	S-2	2
7.	Staf	54	Pembina (IV/a)	1	S-2	1
			Penata (III/c)	2	S-1	2
			Penata Muda Tk I (III/b)	20	S-1	13
					D-III	1
					STM/SMEA	6
			Penata Muda (III/a)	15	S-1	7
					D-III	1
					SMA	7
			Pengatur Tk I (II/d)	8	D-III	2
					SMA	6
			Pengatur (II/c)	6	SMA	2



kekayaan yang belum termanfaatkan. Karakteristik geografis dan struktur serta tipologi ekosistem inilah yang menjadikan Indonesia sebagai mega-biodiversity. Fakta ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki peluang yang sangat potensial dalam memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien pada pembangunan nasional.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Timur yang memiliki potensi besar dari sektor perikanan. Kabupaten Lamongan mampu memberikan kontribusi sebesar 15,25% dari total produksi ikan di Jawa Timur, yaitu sekitar 65.874,984 ton, senilai kurang Rp 446 milyar. Kontribusi terbesar produksi ikan di Kabupaten Lamongan disumbangkan oleh produksi ikan air tawar (sawah tambak) yang didukung areal 22.422,49 hektar. Disamping itu juga disumbangkan oleh produksi perikanan laut yang didukung 19.994 nelayan dan 5.385 armada kapal penangkap ikan. Sehingga Kabupaten Lamongan mampu menghasilkan produksi ikan nomor 3 (tiga) terbesar di Jawa Timur setelah Kabupaten Sumenep dan Probolinggo (KPDE Lamongan, 2007).

Kabupaten Lamongan memiliki luas 1.812,8 km<sup>2</sup> atau ± 3,7% dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara geografis terletak pada 6°51'54" - 7°23'6" LS dan 112°4'41" - 112°35'45" BT. Bagian utara Kabupaten Lamongan berbatasan dengan Kabupaten Gresik, Bagian Selatan dengan Kabupaten Mojokerto dan Jombang, sedangkan bagian barat dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban (Masfuk, 2008).

Suatu kenyataan pahit yang harus diakui bahwa selama orde baru, orientasi pembangunan diorientasikan pada wilayah daratan. Hal inilah yang akhirnya melatarbelakangi kurang tersentuhnya sektor perikanan dan kelautan. Namun, sejak masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul kesadaran untuk

menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan sebagai arus utama pembangunan nasional. Ini tercermin dari keputusan politik bangsa sebagaimana tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai institusi utama (*leading institution*) yang bertanggung jawab memberi arahan, mengeluarkan kebijakan, dan melaksanakan program-program di bidang kelautan dan perikanan.

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan tentang arti kebijakan. Thomas Dye dalam Yani, E.I (2007) menyebutkan bahwa kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sementara Laswell dan Kaplan melihat kebijakan sebagai saran untuk mencapai tujuan, menyebut kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek.

Selain diatur secara terpusat, pembangunan berbasis sumberdaya pada suatu wilayah juga diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian pemerintah daerah mempunyai keleluasaan lebih untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Pengoptimalan sumber daya untuk pembangunan pada suatu wilayah diperlukan suatu pengelolaan yang baik, salah satunya tercermin pada program-programnya.

Potensi ekonomi perikanan yang sangat tinggi di Kabupaten Lamongan, mampu menjadikannya sebagai sektor unggulan. Namun, berdasarkan KPDE Lamongan (2007) disebutkan bahwa peran sektor primer (khususnya pertanian dan perikanan) menunjukkan kecenderungan semakin menurun. Padahal sektor tersier



(khususnya perdagangan, hotel, dan restoran serta jasa) menunjukkan kecenderungan meningkat.

Kita harus ingat bahwa agribisnis, yang dalam hal ini termasuk perikanan merupakan suatu sistem bisnis yang komponennya heterogen. Watak masing-masing komponen berlainan, baik yang menyangkut manusianya maupun proses produksinya. Bahkan pendidikannya pun berbeda yang tentunya dapat mempengaruhi *sense of bussiness*-nya. Ketiga komponen itu harus bisa dikelola dalam satu manajemen yang baik.

Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan sebagai lembaga yang telah diberi kewenangan oleh kepala daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang perikanan, kelautan dan peternakan seharusnya bisa mengelola ketiga komponen tersebut dengan baik. Tentunya diperlukan suatu program yang lebih baik dari pihak terkait, khususnya Sub Bagian Program Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan dalam membangun Perekonomian Kabupaten Lamongan.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1 Maksud**

Praktek kerja lapang dimaksudkan sebagai salah satu langkah dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam bangku perkuliahan dan melatih keterampilan lapang mahasiswa sehingga terbentuk pribadi yang intelek dan kreatif, terutama dalam hal yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan suatu program perikanan.

### 1.2.2 Tujuan

Praktek kerja lapang dilaksanakan guna mengetahui dan mempelajari :

- a. Perencanaan kebijakan dalam bentuk program kerja Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan.
- b. Pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program kerja Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan.
- c. Evaluasi kebijakan dalam bentuk program kerja Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan.

### 1.3 Kegunaan

Hasil pelaksanaan praktek kerja lapang diharapkan berguna bagi :

- a. Masyarakat, sebagai arahan dan pandangan terkait dengan fungsinya dalam program sehingga masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai obyek tetapi juga mampu berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya perikanan.
- b. Peneliti, sebagai penambah ilmu pengetahuan dan keterampilan serta bahan referensi untuk kajian ilmiah selanjutnya.
- c. Pemerintah, sebagai alternatif input dan pertimbangan pembuatan kebijakan dalam upaya pengembangan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan.
- d. Investor, sebagai informasi terkait dengan investasi disektor perikanan di Kabupaten Lamongan.

### 1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Praktek kerja lapang dilaksanakan di Sub Bagian Program serta Sub Dinas Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Penyuluhan Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan pada bulan Juli 2008.

rekap data tentang kelompok tani/pembudidaya/peternak di masing-masing daerah serta memberikan sumbangsih dalam bentuk pemikiran guna perbaikan program Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan di masa yang akan datang, misalnya memberikan masukan/saran terkait dengan rencana pemisahan Dinas Perikanan dan Dinas Peternakan di Kabupaten Lamongan dan berdiskusi terkait hasil shoot kamera tentang penggunaan rumpon di Kranji serta budidaya vannamei di Kabupaten Lamongan. Selain itu pengamatan terkitab juga dilaksanakan dalam bentuk pengkomunikasian hasil praktek kerja lapang berupa analisis SWOT.

#### **b. Metode pengamatan biasa/observasi**

Observasi adalah mengamati (*watching*) dan mendengar (*listening*) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analisis (Black, 1999). Patilima, Hamid (2005) juga menyebutkan bahwa metode pengamatan biasa merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.

Dalam praktek kerja lapang ini, observasi dilakukan selama berada di kantor Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan maupun di luar Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan untuk mengetahui realisasi program Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan dan keterlibatan berbagai stakeholder, misalnya observasi terkait dengan pengkoordinasian program, observasi yang dilakukan di laboratorium klinik kesehatan hewan dan ikan (UPTD), oobservasi terhadap sarana dan prasarana DPKP Kabupaten Lamongan, serta observasi terhadap kegiatan sehari-hari dalam DPKP Kabupaten Lamongan.

### c. Wawancara

Menurut Black, J.A. dan Dean J.C (1999), wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi. Wawancara tidak hanya dapat dilakukan melalui tatap muka, tetapi juga dapat dilakukan melalui telepon. Wawancara juga tidak perlu dibatasi dua orang, tetapi juga dapat dilakukan dengan sekelompok orang.

Pada praktek kerja lapang ini, metode wawancara dilakukan dengan Kepala Tata Usaha terkait dengan penyusunan program, dengan Kepala Sub Dinas Pengembangan SDM dan Penyuluhan terkait dengan penyusunan dan pengkoordinasian program, kendala/penghambat dan pendukung program Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan. Disamping itu, wawancara juga dilakukan dengan pihak-pihak lainnya, misalnya dengan karyawan di Sub Dinas Pengembangan SDM dan Penyuluhan terkait dengan sumber daya manusia di Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, perekrutan karyawan, maupun keberadaan kelompok tani/pembudidaya/peternak dan lain sebagainya.

### d. Pemeriksaan dokumentasi (studi dokumenter)

Somantri, Ating dan Muhidin, S.A (2006) mengungkapkan bahwa pemeriksaan dokumentasi (studi dokumenter) dilakukan dengan meneliti bahan dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dalam penelitian. Pemeriksaan dokumentasi dilakukan guna mengetahui gambaran umum keadaan Kabupaten Lamongan maupun Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan serta rencana strategis DPKP Kabupaten Lamongan. Dokumen-dokumen tersebut berasal dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPKP Kabupaten Lamongan, penelitian terdahulu, serta hasil publikasi lainnya.

## 2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan meliputi :

### a. Data primer

Menurut Cooper, D.R. dan William C.E (1996), data primer merupakan sumber data yang berasal dari sumber asli yang dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan yang diteliti. Jadi, data primer dikumpulkan ketika melakukan observasi. Disamping itu, teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui metode partisipatif dan wawancara mendalam. Metode partisipatif yaitu pengamatan lapangan dengan menggunakan pendekatan pengamatan berpartisipasi serta mempelajari dan mengamati langsung di lapangan data-data yang dibutuhkan. Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan pada berbagai pihak, baik formal maupun informal.

Data primer yang dikumpulkan dalam praktek kerja lapang ini antara lain alur/ langkah yang ditempuh dalam penyusunan program, pembentukan Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, faktor pendukung program Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan maupun fenomena-fenomena yang menjadi faktor penghambat program Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan.

Sumber data primer dalam praktek kerja lapang ini berasal dari hasil partisipasi aktif terhadap program kerja Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, pencatatan langsung saat observasi, maupun hasil wawancara dengan pihak terkait, misalnya Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Dinas Pengembangan SDM dan Penyuluhan, Pegawai Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, dan lain sebagainya.

## **b. Data sekunder**

Cooper, D.R. dan William C.E (1996) mengungkapkan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari studi yang dilakukan oleh pihak lain untuk sasaran mereka sendiri. Sumber data sekunder digolongkan dalam dua sumber informasi, yaitu internal dan eksternal. Sumber internal diperoleh dari data organisasi, misalnya litbang. Sedangkan sumber eksternal diciptakan di luar organisasi, berupa data base yang dikomputerisasi, majalah, pengkoleksian khusus (buku referensi, publikasi universitas, universal tesis, dan catatan penelitian, serta publikasi perusahaan) dan dokumentasi pribadi.

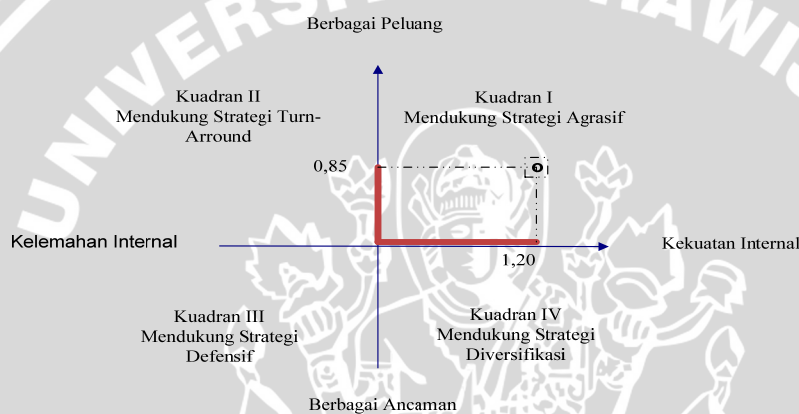
Data sekunder yang dikumpulkan mencakup letak geografis dan batas wilayah serta kondisi sosial, ekonomi, dan demografi Kabupaten Lamongan, gambaran umum Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan (visi, misi, dan struktur organisasi), sarana prasarana, program kerja, akuntabilitas kinerja, serta pendanaan program kerja Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, dan lain sebagainya.

Sumber data sekunder dalam praktek kerja lapang ini adalah Rencana Strategis Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan tahun 2006, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2007, maupun hasil publikasi lainnya.

### **2.3 Analisis Data**

Data yang sudah diperoleh dari praktek kerja lapang ini selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif dengan analisis SWOT. Analisis deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti tentang status manusia, suatu kondisi, suatu sistem penelitian atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode deskriptif adalah untuk mendeskriptifkan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang ada.

Sedangkan analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*), peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan secara strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan (Rangkuti, 2004). Dengan demikian analisis SWOT bisa ditunjukkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Analisis SWOT

Dari diagram tersebut terlihat adanya 4 kuadran :

Kuadran 1: ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan/ lembaga tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.

Kuadran 2 : meskipun menghadapi berbagai macam ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi.

Kuadran 3 : perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal.

Fokus strateginya adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

Kuadran 4 : ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan atau lembaga tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.





Tabel 10. Proses Kebijakan : Kerangka Analisa

Kegiatan-Kegiatan Fungsional	Dikategorikan dalam Pemerintahan	Dengan sebuah Produk Potensial
Persepsi/definisi Agregasi Organisasi Representasi Penyusunan agenda	Masalah-masalah ke/pada Pemerintahan	Problem Tuntutan ( <i>demand</i> ) Tuntutan Akses Prioritas-prioritas
Formulasi Legitimasi Penganggaran	Tindakan dalam pemerintahan	Proposal Program Anggaran/sumberdaya ( <i>resources</i> )
Implementasi	Pemerintah ke/pada masalah-masalah	Bervariasi (pelayanan, pembayaran, kemudahan, pengawasan)
Evaluasi Penyesuaian/terminasi	Program ke pemerintahan	Bervariasi (justifikasi, rekomendasi, perubahan, solusi)

Sumber : Jones, C.O (1991)

## 5.2 Perencanaan Program Kerja DPKP Kabupaten Lamongan

Di Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan proses kebijakan tersebut dilangsungkan melalui beberapa tahap dan secara umum sudah menjalankan proses kebijakan Jones, C.O (1991). Biasanya nelayan/pembudidaya ikan/peternak di masing-masing desa/kecamatan memberikan usulan/masukan kepada Dinas. Pengajuan ini dilakukan satu tahun sebelum dikirim. Selanjutnya usulan tersebut disesuaikan dengan RPJM, Renstra Daerah, Renstra SKPD, dan Renstra Dinas (lima tahunan) lalu dijabarkan tiap tahunnya. Masukan/usulan/tuntutan/masalah yang mereka berikan kepada pemerintah disaring antara 40-60% dari total yang ada.

Dalam hal ini, DPKP Kabupaten Lamongan harus bisa mendefinisikan, mengklasifikasikan, menjelaskan dan mengevaluasi masalah secara selektif, karena masalah merupakan suatu hal yang obyektif. Selain itu, penyelesaian masalah sebaiknya tidak menggunakan pendekatan analitik sebab masalah yang ada tidak dapat dipisahkan secara terpisah satu dengan yang lain. Pada bulan

Januari proposal tersebut harus sudah jadi, dan pada bulan berikutnya (Februari) dikirim ke daerah/pusat. Proposal tersebut baru keluar kembali pada bulan Agustus. Selanjutnya disusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2006-2010 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis DPKP Kabupaten Lamongan tahun 2006-2010 dapat dilihat dalam Lampiran 3.

Rencana strategis berjangka menengah tersebut dijabarkan setiap tahunnya. Pada tahun 2007 misalnya, DPKP Kabupaten Lamongan memiliki dua tujuan yang harus dicapai pada tahun tersebut, yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan serta meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan. Rencana Kerja DPKP Kabupaten Lamongan tahun 2007 secara lengkap ada pada Lampiran 4.

Rencana strategis DPKP Kabupaten Lamongan berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis pembangunan perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Lamongan, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengacu pada INPRES No.7 tahun 1999, rencana Pembangunan Jangka Menengah/ RPJM, UU No. 31 tahun 2004. Karena itu strategi yang harus dikembangkan dalam mengelola potensi sumberdaya perikanan kelautan dan peternakan yang melimpah di Kabupaten Lamongan secara bertanggungjawab sekaligus menjaga kelestarian dan berorientasi pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Maksud penyusunan Renstra SKPD DPKP Kabupaten Lamongan 2006-2010 adalah untuk menjabarkan RPJM Kabupaten Lamongan serta visi dan misi DPKP Kabupaten Lamongan. Dalam rangka penjabaran RPJM tersebut kedalam visi, misi, tujuan, kebijakan dan program-program pembangunan serta aspirasi masyarakat dan stakeholder di bidang perikanan, kelautan dan peternakan ke

dalam dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah /Renstra SKPD tahun 2006-2010.

Tujuan penyusunan Renstra DPKP Kabupaten Lamongan 2006-2010 adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan di bidang ekonomi di sektor perikanan, kelautan dan peternakan, yang memberikan arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran dan program yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan. Dengan demikian maka Renstra SKPD DPKP Kabupaten Lamongan menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Renstra SKPD.

Rencana strategis DPKP Kabupaten Lamongan mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran serta cara pencapaian tujuan sebagai berikut :

**a. Visi**

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan mempunyai visi:

“Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui optimalisasi usaha dan pemberdayaan masyarakat di bidang perikanan kelautan dan peternakan.”

Makna dari visi tersebut adalah keadaan masyarakat Kabupaten Lamongan yang bekerja sebagai pemelihara ikan, penangkapan ikan dan memelihara ternak yang mampu bertahan dalam berbagai perubahan keadaan, berupaya merubah dari kegiatan yang bersifat tradisional menuju kawasan industri dan berjiwa bisnis dengan mengutamakan potensi yang ada di daerah.

Tujuan penetapan Visi tersebut adalah :

- mencerminkan keinginan yang akan dicapai oleh DPKP
- memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- memilih orientasi terhadap masa depan

- memberdayakan potensi yang tersedia
- arah pengelolaan yang produktif dan lestari

#### **b. Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dirumuskan misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya. Adapun misi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- Mengembangkan dan mendayagunakan sumberdaya perikanan, kelautan dan peternakan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab
- Mengembangkan sarana prasarana, teknologi dan informasi perikanan, kelautan dan peternakan
- Mengembangkan kemandirian dan kelembagaan pembudidaya ikan, nelayan dan peternak yang tangguh, mandiri dan berdaya saing
- Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan, nelayan dan peternak serta memperluas lapangan dan kesempatan kerja

### **5.3 Pelaksanaan Program Kerja DPKP Kabupaten Lamongan**

Rencana strategis berjangka menengah selanjutnya dijabarkan setiap tahunnya. Pada tahun 2007 misalnya, DPKP Kabupaten Lamongan memiliki dua tujuan yang harus dicapai pada tahun tersebut, yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan serta meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan. Rencana Kerja DPKP Kabupaten Lamongan tahun 2007 secara lengkap ada pada Lampiran 4 .

Berdasarkan data yang tercantum pada Lampiran 4 dapat diketahui bahwa dari rencana lima tahunan yang disusun oleh DPKP Kabupaten Lamongan, sampai tahun 2007 DPKP Kabupaten Lamongan telah mencapai dua sasaran. Kedua sasaran itu adalah meningkatkan produksi dan produktivitas

peternakan dan meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dengan program pengembangan peternakan dan perikanan melalui kegiatan optimalisasi produksi hasil ternak dan optimalisasi produksi hasil perikanan.



BAPAK CAMAT KALITENGAH SEDANG MEMBERI ARAHAN KEPADA PESERTA PEMBINAAN PEMBUDIDAYA IKAN, NELAYAN DAN PETERNAK



LOKASI DEMPLOT BUDIDAYA UDANG VANAMEE DI DESA DUDUK LOR KEC. GLAGAH (PERSIAPAN LAHAN)



TIM OPERASI SEDANG MEMERIKSA SURAT-SURAT KELENGKAPAN KAPAL



REALISASI DANA PENGUATAN MODAL

Gambar 4. Beberapa Kegiatan DPKP Kabupaten Lamongan

Dari Gambar 4 dapat dilihat beberapa contoh kegiatan yang dilakukan DPKP Kabupaten Lamongan, yaitu pemberian arahan kepada peserta pembudidaya ikan, nelayan dan peternak, demplot budidaya udang vannamei, operasi pemeriksaan surat-surat kelengkapan kapal, dan realisasi dana penguatan modal. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan maksud-maksud tertentu. Pembinaan kelompok pembudidaya ikan, nelayan dan peternak misalnya, dilakukan sebagai satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga mampu meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam mengelola usaha. Selain itu juga dilakukan demplot sehingga pembudidaya ikan/petani sawah tambak atau peternak yakin terhadap

keunggulan/keuntungan teknologi baru yang dicontohkan dan penyediaan pupuk organik dengan harapan agribisnis bisa dikembangkan melalui pemanfaatan SDA lokal sehingga pendapatan, gizi maupun kesejahteraan keluarga ataupun masyarakat mengalami peningkatan. Meskipun demikian, DPKP Kabupaten Lamongan masih memiliki banyak pekerjaan dalam menyelesaikan kinerja sesuai yang telah direncanakan.

#### a. Pembiayaan Program Kerja DPKP Kabupaten Lamongan

Tabel 11. Pembiayaan Program Kerja DPKP Kabupaten Lamongan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan	1.632.900.000
2.	Belanja Daerah	
	a. Belanja Tidak Langsung	
	- belanja pegawai	3.186.236.000
	b. Belanja Langsung	
	- Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	84.345.000
	- Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	30.000.000
	- Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informal	45.000.000
	- Program peningkatan kesejahteraan petani	65.000.000
	- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	465.000.000
	- Program peningkatan produksi hasil peternakan	2.802.270.800
	- Program pelayanan administrasi perkantoran	387.968.500
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	395.195.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.000.000
	- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	134.000.000
	- Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	100.000.000
	- Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan iklim laut	1.732.500.000
	- Program pengembangan budidaya perikanan	1.438.300.000
	- Program pengembangan perikanan tangkap	1.725.085.000
	- Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	32.041.800
	- Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi	912.450.000
	Jumlah Belanja Langsung	10.373.156.100
	Jumlah APBD Kabupaten A+B	13.559.392.100

Sumber : LAKIP DPKP Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2007

Pada Tabel 11 dapat dilihat rincian pembiayaan program kerja DPKP Kabupaten Lamongan. Pembiayaan tersebut digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang perikanan, kelautan dan peternakan. Pembiayaan program kerja DPKP Kabupaten Lamongan bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan, APBD Propinsi, maupun APBN.

#### **b. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Kerja DPKP Kabupaten Lamongan**

Beberapa hal yang menjadi pendukung terlaksananya program kerja DPKP Kabupaten Lamongan adalah :

- tingginya potensi perikanan dan kelautan Kabupaten Lamongan
- dukungan dari pemerintah dan pihak legislatif, terutama dalam hal pembiayaan dan penyusunan rencana kerja strategis
- organisasi dan tata kerja DPKP Kabupaten Lamongan jelas (sesuai Perda no 14 Tahun 2001 tertanggal 22 Desember 2001)
- dukungan dari beberapa stakeholder lain
- peluang pasar semakin terbuka lebar
- adanya kelompok nelayan/pembudidaya ikan/ peternak

Kendala utama pengembangan perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Lamongan adalah :

- terbatasnya sarana produksi berkualitas dalam menunjang kegiatan budidaya ikan dan ternak
- teknologi budidaya ikan dan ternak serta penangkapan ikan masih rendah
- kepastian pasar yang berkelanjutan
- kesulitan mendapatkan akses permodalan
- nelayan terkonsentrasi pada wilayah padat tangkap
- kurangnya koordinasi di antara stakeholder
- kualitas SDM pembudidaya ikan, peternak dan nelayan yang masih rendah

- masih sulitnya menerima pembaharuan dengan menggunakan manajemen yang benar

Untuk mengatasi hal tersebut, DPKP Kabupaten Lamongan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan secara konsisten bersama pihak legislatif melalui Renstra secara eksplisit menetapkan kebijakan-kebijakan prioritas sebagai solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan.

#### 5.4 Evaluasi Program Kerja DPKP Kabupaten Lamongan

##### a. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pembangunan di bidang perikanan, kelautan dan peternakan, yang mempunyai komitmen untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan dalam pelayanan masyarakat di bidang Perikanan, Kelautan dan Peternakan.

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka dapat diukur capaian sasaran dengan indikator sasaran dan capaian kegiatan dengan indikator kinerja, yakni :

- **Analisa Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.

Untuk itu DPKP Kabupaten Lamongan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Sedangkan formulasi yang digunakan untuk menentukan target (rencana tingkat capaian) adalah :

$$\text{Target} = \frac{\text{Indikator tahun yang bersangkutan} - \text{Indikator tahun sebelumnya}}{\text{Indikator sebelumnya}}$$

Untuk pengukuran rencana keberhasilan capaian kinerja digunakan instrumen pengukuran ordinal. Skoring tolok ukur capaian kinerja DPKP Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Skoring Tolok Ukur Capaian Kinerja

Skoring	Nilai
85-100	Sangat baik/Sangat berhasil
70-<85	Baik/Berhasil
55-<70	Kurang baik/Kurang berhasil
<55	Sangat kurang baik/Sangat kurang berhasil

Sumber : LAKIP DPKP Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2007

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, maka Analisa Capaian Kinerja yang dipakai sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang berupa pencapaian sasaran sebagaimana pada lampiran.

Pada tahun anggaran 2007, DPKP Kabupaten Lamongan analisa capaian kinerjanya dikatakan sangat berhasil. Hal ini disebabkan karena hasil pengukuran ordinal dari rencana keberhasilan kinerja dari DPKP Kabupaten Lamongan mencapai angka 100%, bahkan ada beberapa yang nilainya di atas 100% yaitu jumlah produksi hasil ternak, perikanan laut, perikanan perairan umu, dan perikanan budidaya. Dari dua sasaran strategis yang telah ditetapkan, capaian kinerja secara kumulatif pada tahun anggaran 2007 sebesar 101, 48%. Sedangkan capaian kinerja rata-rata 101, 48%. Analisa capaian kinerja DPKP

Kabupaten Lamongan tahun 2007 lengkap dengan penjabaran indikator, target dan realisasinya dapat dilihat pada Lampiran 5.

#### b. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran alokasi dana yang cukup mendukung pencapaian sasaran dengan indikator sasaran, program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja, meliputi *output* dan *outcome*. Adapun rincian akuntabilitas keuangan DPKP Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Rincian Akuntabilitas Keuangan DPKP Kabupaten Lamongan

No	Sasaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Peternakan	3.332.270.800	3.268.067.234	98,10
2	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan	6.233.721.800	6.065.144.300	97,30
Jumlah		9.565.992.600	9.333.211.534	97,7

Sumber : LAKIP DPKP Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2007

DPKP Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2007 telah melaksanakan dua sasaran, satu program, dan dua kegiatan yang terdiri dari beberapa (16 sub kegiatan) dengan dana Rp 9.565.992.600 dan realisasinya sebesar Rp 9.333.211.534 dengan capaian akuntabilitas keuangan rata-rata sebesar 97,7%. Sisa anggaran tersebut sebesar Rp 232.781.066 atau 2,49% dan dikembalikan ke kas daerah.

#### c. Evaluasi Program Berdasarkan Analisis SWOT

Berdasarkan data-data di atas, maka dapat dilakukan suatu analisis yang dalam hal ini digunakan metode analisis SWOT. Menurut Rangkuti (2005), kinerja suatu perusahaan/lembaga dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternalnya. Kedua faktor tersebut dipertimbangkan dalam analisis

SWOT. SWOT merupakan singkatan dari lingkungan internal *Strengths* dan *Weakness* serta lingkungan eksternal *Opportunities* dan *Treaths* yang dihadapi.

➤ **Matriks Faktor Strategi Internal**

Setelah faktor-faktor strategi internal suatu perusahaan/lembaga diidentifikasi, suatu tabel IFAS (*Internal Strategic Faktors Analysis Summary*) disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategi internal tersebut dalam kerangka *Strengths and Weakness* perusahaan/lembaga. Tahapnya adalah :

1. Tentukan faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan/lembaga dalam kolom 1
2. Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (untuk faktor-faktor internal yang paling penting) hingga 0,0 (untuk faktor-faktor internal yang tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan/lembaga. Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00.
3. Hitung rating dalam kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari +4 (*outstanding*) sampai dengan +1 (*poor*), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi organisasi yang bersangkutan.
  - Rating +4 apabila faktor memiliki kekuatan yang sangat besar
  - Rating +3 apabila faktor memiliki kekuatan yang cukup besar
  - Rating +2 apabila faktor memiliki kekuatan yang sedang
  - Rating +1 apabila faktor memiliki kekuatan yang kecil

Sebaliknya untuk faktor yang bersifat kelemahan rating yang diberikan berkisar antara 1 sampai dengan 4 dimana

- Rating 4 apabila faktor memiliki kelemahan yang kecil
- Rating 3 apabila faktor memiliki kelemahan yang sedang
- Rating 2 apabila faktor memiliki kelemahan yang cukup besar
- Rating 1 apabila faktor memiliki kelemahan yang sangat besar

4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3 untuk memperoleh faktor pembobotan. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai antara 4,0 sampai dengan 1,0
5. Berilah komentar ataupun catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung pada kolom 5.
6. Jumlahkan skor pembobotan pada kolom 4 untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan/lembaga yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana suatu perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya.

Berdasarkan tahapan di atas, dapat disusun matriks faktor strategi internal Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan :

**Strength (kekuatan)**

1. Organisasi dan tata kerja DPKP Kabupaten Lamongan jelas (sesuai Perda no 14 Tahun 2001 tertanggal 22 Desember 2001)
2. Adanya dukungan anggaran yang memadai yang bersumber dari dana APBD, APBN.
3. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan dan kelautan yang mendukung
4. Sumberdaya alam dibidang perikanan dan kelautan yang melimpah

**Weakness (kelemahan)**

1. Struktur organisasi yang masih menggabungkan antara perikanan dan peternakan
2. Kurangnya sumber daya manusia di sektor perikanan dan kelautan
3. Kualitas SDM pembudidaya ikan, peternak dan nelayan yang masih rendah
4. Ketergantungan nelayan / pembudidaya ikan skala kecil terhadap pemerintah

Berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang telah disusun tersebut, maka dapatlah ditentukan suatu tabel IFAS dari masing-masing faktor yang berpengaruh terhadap strategi Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan, yaitu

Tabel 14. IFAS Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Strategi DPKP Kabupaten Lamongan

Faktor-Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Komentar
<b>Strength (kekuatan)</b>				
1. Organisasi dan tata kerja DPKP Kabupaten Lamongan jelas (sesuai Perda no 14 Tahun 2001 tertanggal 22 Desember 2001)	0,1	3	0,3	Otoritas dan kewenangan pengelolaan perikanan dan kelautan
2. Adanya dukungan anggaran yang memadai yang bersumber dari dana APBD, APBN.	0,15	4	0,6	Menentukan jalannya program DPKP
3. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan dan kelautan yang mendukung	0,05	3	0,15	Mendukung pelaksanaan program
4. Sumberdaya alam dibidang perikanan dan kelautan yang melimpah	0,2	4	0,8	Modal dasar pelaksanaan program
<b>Weakness (kelemahan)</b>				
1. Struktur organisasi yang masih menggabungkan antara perikanan dan peternakan	0,2	1	0,2	Lemahnya koordinasi, integrasi, dan sinkronasi
2. Kurangnya sumber daya manusia di sektor perikanan dan kelautan	0,15	1	0,15	Potensi kurang tergarap secara maksimal
3. Kualitas SDM pembudidaya ikan, peternak dan nelayan yang masih rendah	0,1	2	0,2	Sulit memberlakukan pembaharuan
4. Ketergantungan nelayan / pembudidaya ikan skala kecil terhadap pemerintah	0,05	3	0,15	Inovasi dan kreasi kurang berkembang
Total	1,0		2,55	

Analisis tiap-tiap faktor :

**Strength (kekuatan)**

1. Organisasi dan tata kerja DPKP Kabupaten Lamongan jelas (sesuai Perda no 14 Tahun 2001 tertanggal 22 Desember 2001). Faktor ini diberi bobot 0,1 karena tingkat kepentingannya cukup tinggi dan diberi rating 3 karena dianggap memiliki kekuatan yang besar. Dengan adanya perda maka kedudukan DPKP Kabupaten Lamongan secara yuridis dapat diakui. Dengan demikian DPKP Kabupaten Lamongan memiliki wewenang dalam mengelola sumberdaya perikanan, kelautan dan peternakan di Kabupaten Lamongan.
2. Adanya dukungan anggaran yang memadai yang bersumber dari dana APBD, APBN. Faktor ini diberi bobot 0,15 karena tingkat kepentingannya tinggi dan diberi rating 4 karena dianggap memiliki kekuatan yang sangat besar. Dukungan anggaran merupakan salah satu faktor yang menentukan kelancaran berjalannya program DPKP Kabupaten Lamongan. Anggaran inilah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan guna terlaksananya program/ kegiatan DPKP Kabupaten Lamongan.
3. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan dan kelautan yang mendukung. Faktor ini diberi bobot 0,05 karena tingkat kepentingannya tidak terlalu tinggi dan diberi rating 3 karena dianggap memiliki kekuatan yang besar. Ketersediaan sarana dan prasarana ini dapat menunjang berjalannya suatu program/kegiatan. Tetapi ketiadaannyapun bisa diupayakan, baik melalui peminjaman/sewa ataupun pembelian.
4. Sumberdaya alam dibidang perikanan dan kelautan yang melimpah. Faktor ini diberi bobot 0,2 karena tingkat kepentingannya sangat tinggi dan diberi bobot 4 karena dianggap memiliki kekuatan yang besar. SDA yang melimpah ini bisa menjadi kekuatan yang besar bila didukung oleh SDM yang tinggi pula.

Jika hal ini bisa terwujud maka peningkatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi terutama di sektor perikanan dan peternakan bisa dicapai.

#### **Weakness (kelemahan)**

1. Struktur organisasi yang masih menggabungkan antara perikanan dan peternakan diberi bobot 0,2 karena tingkat kepentingannya sangat tinggi dan diberi rating 1 karena dianggap memiliki kelemahan yang sangat besar. Hal ini menjadi kelemahan yang sangat besar sebab akan menyebabkan lemahnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kecenderungan pola pikir yang parsial dalam pelaksanaan program. Padahal baik program maupun kebijakan adalah suatu permasalahan yang memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain. Lemahnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kecenderungan pola pikir yang parsial akan menyebabkan tidak terselesaikannya masalah yang ada, bahkan masalah baru mungkin saja akan terjadi.
2. Kurangnya sumber daya manusia di sektor perikanan dan kelautan. Faktor ini diberi bobot 0,15 karena tingkat kepentingannya tinggi dan diberi rating 1 karena dianggap memiliki kelemahan yang sangat besar. Kurangnya sumber daya manusia di sektor perikanan dan kelautan menjadi kelemahan yang sangat besar karena hal tersebut terkait dengan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang ada di Kabupaten Lamongan. Bila SDM rendah, kemungkinan besar SDA yang melimpah tidak bisa dioptimalkan, sehingga pemanfaatannya pun menjadi tidak maksimal.
3. Kualitas SDM pembudidaya ikan, peternak dan nelayan yang masih rendah. Faktor ini diberi bobot 0,1 karena tingkat kepentingannya cukup tinggi dan diberi rating 2 karena dianggap memiliki kelemahan yang besar. Seringkali kualitas SDM yang rendah menyebabkan seorang sulit menerima hal-hal yang baru. Mereka seringkali menganggap bahwa cara lama tetaplah lebih

baik. Hal ini bisa menjadi penyebab ketidaklancaran program/ kebijakan pemerintah.

4. Ketergantungan nelayan / pembudidaya ikan skala kecil terhadap pemerintah. Faktor ini diberi bobot 0,05 karena tingkat kepentingannya tidak terlalu tinggi dan diberi bobot 3 karena dianggap memiliki kelemahan yang sedang. Umumnya nelayan/pembudidaya ikan ini tergantung kepada subsidi pemerintah. Hal ini terjadi karena harga bahan baku produksi, misalnya pakan, bahan bakar, dan lain sebagainya. Tingginya ketergantungan ini akan menyebabkan inovasi maupun kreasi mereka kurang bisa berkembang.

➤ **Matriks Faktor Strategi Eksternal**

Sebelum membuat matriks faktor strategi eksternal, perlu diketahui terlebih dahulu faktor strategi eksternal (EFAS). Berikut ini adalah cara-cara penentuan EFAS:

1. Menentukan faktor yang menjadi peluang dan ancaman dalam kolom 1
2. Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2 dengan skala mulai dari 1,0 (untuk faktor yang dianggap paling penting) sampai 0,0 (untuk faktor dianggap paling tidak penting)
3. Hitung rating dalam kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) hingga 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi organisasi yang bersangkutan.
  - Rating +4 apabila faktor memiliki peluang yang sangat besar
  - Rating +3 apabila faktor memiliki peluang yang cukup besar
  - Rating +2 apabila faktor memiliki peluang yang sedang
  - Rating +1 apabila faktor memiliki peluang yang kecil

Sebaliknya untuk faktor yang bersifat ancaman rating antara 1 sampai dengan 4 dimana



- Rating 4 apabila faktor memiliki ancaman yang kecil
  - Rating 3 apabila faktor memiliki ancaman yang sedang
  - Rating 2 apabila faktor memiliki ancaman yang cukup besar
  - Rating 1 apabila faktor memiliki ancaman yang sangat besar
4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3 untuk memperoleh faktor pembobotan. Hasilnya berupa berupa skor pembobotan untuk masing masing faktor yang nilainya bervariasi antara 4 (*outstanding*) sampai dengan 1(*poor*).
  5. Beri komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung
  6. Jumlahkan skor pembobotan pada kolom 4 untuk memperoleh total skor pembobotan bagi organisasi yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan/lembaga tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategi eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan lembaga ini dengan yang lain dalam kelompok yang sama.

Berdasarkan tahapan di atas, dapat disusun matriks faktor strategi eksternal Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan :

#### **Opportunity (Peluang)**

1. Tersediannya potensi sumberdaya perikanan dan kelautan
2. Peluang pasar yang terbuka lebar
3. Dukungan dari pemerintah dan pihak legislatif, terutama dalam hal pembiayaan dan penyusunan rencana kerja strategis
4. Adanya kelompok nelayan/pembudidaya ikan/peternak yang memudahkan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan program

#### **Threats (Ancaman)**

1. Terbatasnya teknologi dan sarana produksi berkualitas dalam menunjang kegiatan budidaya ikan dan ternak

2. Kurangnya koordinasi di antara stakeholder
3. Kesulitan mendapatkan akses permodalan
4. Kepastian pasar yang berkelanjutan
5. Masih sulitnya menerima pembaharuan

Berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang telah disusun tersebut, maka dapatlah ditentukan suatu tabel EFAS dari masing-masing faktor yang berpengaruh terhadap strategi Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan, yaitu :

Tabel 15. EFAS Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Strategi DPKP Kabupaten Lamongan

Faktor-Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Komentar
<b>Opportunity (Peluang)</b>				
1. Tersediannya potensi sumberdaya perikanan dan kelautan	0,2	4	0,8	Memberikan kontribusi yang tinggi
2. Peluang pasar yang terbuka lebar	0,1	3	0,3	Peningkatan permintaan
3. Dukungan dari pemerintah dan pihak legislatif	0,1	3	0,3	Pengelolaan secara optimal
4. Adanya kelompok nelayan/pembudidaya ikan/ peternak	0,1	3	0,3	Kelancaran program
<b>Threats (Ancaman)</b>				
1. Terbatasnya teknologi dan sarana produksi berkualitas dalam menunjang kegiatan budidaya ikan dan ternak	0,05	3	0,15	Potensi kurang tergarap secara maksimal
2. Kurangnya koordinasi di antara stakeholder	0,1	2	0,2	Misscommunication
3. Kesulitan mendapatkan akses permodalan	0,15	2	0,3	Program tidak berjalan lancar
4. Kepastian pasar yang berkelanjutan	0,125	2	0,25	Memunculkan keraguan
5. Masih sulitnya menerima pembaharuan	0,075	2	0,15	Sulit menerapkan program baru
Total	1,0		2,75	

Analisis tiap-tiap faktor :

**Opportunity (Peluang)**

1. Tersediannya potensi sumberdaya perikanan dan kelautan. Faktor ini diberi bobot 0,2 karena tingkat kepentingannya tinggi dan diberi rating 4 karena dianggap memiliki peluang yang sangat tinggi. Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan merupakan modal dasar dalam mengembangkan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Lamongan. Apabila modal dasar ini bisa dioptimalkan, maka kontribusi yang tinggi dari sektor ini terhadap PDRB maupun PAD bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.
2. Peluang pasar yang terbuka lebar. Faktor ini diberi bobot 0,1 karena tingkat kepentingannya sedang dan diberi rating 3 karena dianggap memiliki peluang tinggi. Pemasaran seringkali disebut sebagai ujung tombak perusahaan, karena tanpa adanya aktivitas maka tidak akan tercipta sumber penghasilan. Selain itu, adanya peluang pasar yang terbuka lebar akan menyebabkan permintaan menjadi meningkat, sehingga kesempatan untuk memenuhi permintaan tersebut menjadi suatu hal yang cukup menjanjikan.
3. Dukungan dari pemerintah dan pihak legislatif, terutama dalam hal pembiayaan dan penyusunan rencana kerja strategis. Faktor ini diberi bobot 0,1 karena tingkat kepentingannya sedang dan diberi rating 3 karena dianggap memiliki peluang yang tinggi. Dengan dukungan baik yang berupa dukungan moril maupun materiil akan menjadi jalan untuk menyelesaikan permasalahan dibidang perikanan dan kelautan. Dengan demikian, potensi yang ada bisa dikelola secara optimal.
4. Adanya kelompok nelayan/pembudidaya ikan/peternak yang memudahkan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan program. Faktor ini diberi bobot 0,1 karena tingkat kepentingannya sedang dan diberi rating 3 karena dianggap memiliki peluang tinggi. Bila diperhatikan, kelompok

nelayan/pembudidaya ikan/peternak adalah obyek sekaligus subyek dari pembangunan perikanan, kelautan maupun peternakan. Keterlibatan mereka dalam proses kebijakan selain bisa menciptakan hubungan yang baik juga bisa mempermudah dan memperlancar serta menjadikan program tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran.

### **Threats (Ancaman)**

1. Terbatasnya teknologi dan sarana produksi berkualitas dalam menunjang kegiatan budidaya ikan dan ternak. Faktor ini diberi bobot 0,05 karena tingkat kepentingannya rendah dan diberi rating 3 karena dianggap memiliki ancaman yang cukup rendah. Teknologi dan sarana produksi yang berkualitas diperlukan untuk memaksimalkan penggarapan potensi di bidang perikanan dan kelautan. Melalui peningkatan kualitas teknologi dan sarana produksi inilah produksi perikanan dan kelautan bisa ditingkatkan mutu dan nilainya.
2. Kurangnya koordinasi di antara stakeholder . Faktor ini diberi bobot 0,1 karena tingkat kepentingannya sedang dan diberi rating 2 karena dianggap memiliki ancaman yang besar. Komunikasi sangat diperlukan dalam segala hal, termasuk dalam proses kebijakan. Melalui komunikasi ini proses kebijakan bisa dikoordinasikan dengan stakeholder terkait sehingga kesalahan komunikasi yang nantinya bisa menghambat berjalannya program dapat dihindari.
3. Kesulitan mendapatkan akses permodalan. Faktor ini diberi bobot 0,15 karena tingkat kepentingannya besar dan diberi rating 2 karena dianggap memiliki kekuatan yang besar. Modal merupakan barang atau uang yang bersama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru. Kesulitan dalam mendapatkan akses permodalan bias menghambat berjalannya program.

4. Kepastian pasar yang berkelanjutan. Faktor ini diberi bobot 0,125 karena tingkat kepentingannya sedang dan diberi rating 2 karena dianggap memiliki kekuatan yang besar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemasaran seringkali disebut sebagai ujung tombak perusahaan, karena tanpa adanya aktivitas pemasaran maka tidak akan tercipta sumber penghasilan. Terbukanya pasar menjadi suatu peluang dalam menjalankan suatu usaha. Namun ketidakpastian pasar juga akan menjadi penghambat dalam pengoptimalan/pelaksanaan suatu usaha sebab akan menimbulkan keraguan pada pelakunya.

5. Masih sulitnya menerima pembaharuan . Faktor ini diberi bobot 0,075 karena tingkat kepentingannya rendah dan diberi rating 2 karena dianggap memiliki kekuatan yang besar. Seringkali para nelayan/pembudidaya ikan/peternak sulit menerima pembaharuan. Hal ini terjadi karena adanya anggapan cara yang diajarkan/diturunkan oleh nenek moyang tetaplah yang terbaik sepanjang waktu. Bila ini terjadi secara terus-menerus, maka program yang telah direncanakan akan menjadi sulit untuk diterapkan.

Setelah terbentuk tabel IFAS dan EFAS, maka dapat disusun matriks SWOT terkait dengan program DPKP Kabupaten Lamongan. Alat ini dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis. Dengan matriks ini dapat digambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi DPKP Kabupaten Lamongan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Sehingga bisa digunakan sebagai dasar penyusunan suatu program.

Tabel 16. Matriks SWOT Program DPKP Kabupaten Lamongan

<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	<p><i>Strength (S)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi dan tata kerja DPKP Kabupaten Lamongan jelas</li> <li>2. Dukungan anggaran yang memadai dari dana APBD, APBN.</li> <li>3. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan dan kelautan</li> <li>4. Sumberdaya alam dibidang perikanan dan kelautan yang memadai</li> </ol>	<p><i>Weakness (W)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur organisasi yang masih digabung antara perikanan dan peternakan</li> <li>2. SDM di sektor perikanan dan kelautan kurang</li> <li>3. Rendahnya kualitas SDM pembudidaya ikan dan nelayan</li> <li>4. Ketergantungan nelayan / pembudidaya ikan skala kecil terhadap pemerintah</li> </ol>
<p><i>Opportunity (O)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi SDA perikanan dan kelautan tinggi</li> <li>2. Peluang pasar terbuka lebar</li> <li>3. Dukungan pemerintah dan pihak legislatif dalam pembiayaan dan penyusunan renstra</li> <li>4. Adanya kelompok nelayan/pembudidaya ikan/peternak</li> </ol>	<p>Strategi SO</p> <p>Optimalisasi sumber daya alam dan peluang pasar dengan pemanfaatan secara maksimal sarana prasarana serta dukungan pemerintah dalam hal pembiayaan dan penyusunan program dengan memanfaatkan kelompok nelayan/ pembudidaya ikan/peternak yang ada di masing-masing daerah sehingga bisa menjadi sektor primer</p>	<p>Strategi WO</p> <p>Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemandirian di sektor perikanan dan kelautan dan kelompok nelayan/ pembudidaya ikan/peternak guna memaksimalkan potensi sumber daya alam, peluang pasar, sarana prasarana dan permodalan serta pemisahan pengelolaan perikanan dan peternakan</p>
<p><i>Threats (T)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya teknologi dan sarana produksi berkualitas dalam menunjang kegiatan perikanan</li> <li>2. Kurangnya koordinasi di antara stakeholder</li> <li>3. Kesulitan mendapatkan akses permodalan</li> <li>4. Kepastian pasar yang berkelanjutan</li> <li>5. Masih sulitnya menerima pembaharuan</li> </ol>	<p>Strategi ST</p> <p>Meminta dukungan pemerintah untuk penambahan sarana dan prasarana produksi yang memiliki kualitas tinggi, peningkatan koordinasi, dan silang informasi antara DPKP dengan pemerintah/stakeholder lain perihal permodalan dan kepastian pasar</p>	<p>Strategi WT</p> <p>Peningkatan SDM, memperkuat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi stakeholder terkait melalui pemisahan sektor perikanan dan peternakan, pemetaan pasar, pengubahan pola pikir masyarakat perikanan, pembaharuan teknologi.</p>

Analisis gabungan dua strategi :

### **Strategi SO**

Dengan melihat *Strength* (Kekuatan) dan *Opportunity* (Peluang), bisa disimpulkan bahwa optimalisasi sumberdaya alam dan peluang pasar di sektor perikanan dan kelautan bias dilakukan dengan pemanfaatan secara maksimal sarana prasarana serta dukungan pemerintah maupun pihak legislatif dalam hal pembiayaan dan penyusunan program DPKP Kabupaten Lamongan dengan memanfaatkan kelompok nelayan/ pembudidaya ikan/peternak yang ada di masing-masing daerah. Dengan demikian, ini perikanan dan kelautan bisa menjadi sektor primer yang mampu meningkatkan PAD Kabupaten Lamongan.

### **Strategi ST**

Berdasarkan *Strength* (kekuatan) dan *Threats* (ancaman) yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumberdaya perikanan dan kelautan yang memadai bias dioptimalkan melalui cara meminta dukungan kepada pemerintah untuk penambahan sarana dan prasarana produksi yang memiliki kualitas tinggi guna meningkatkan mutu dan nilai tambah produksi perikanan dan kelautan. Disamping itu, diperlukan peningkatan koordinasi, dan silang informasi antara DPKP dengan pemerintah/stakeholder lain perihal permodalan dan kepastian pasar guna menunjang usaha di bidang perikanan dan kelautan di Kabupaten Lamongan.

### **Strategi WO**

Dengan melihat *Weakness* (kelemahan) dan *Opportunity* (peluang) di Kabupaten Lamongan, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemandirian di sektor perikanan dan kelautan sehingga potensi yang ada bisa dioptimalkan. Selain itu, keberadaan kelompok nelayan/ pembudidaya ikan/peternak, peluang pasar yang terbuka lebar, sarana prasarana dan

permodalan perlu dimanfaatkan. Selain itu juga perlu adanya pemisahan antara sektor perikanan dan peternakan sehingga pengelolaan bisa optimal.

### **Strategi WT**

Dengan mempertimbangkan *Weakness* (kelemahan) dan *Threats* (ancaman) yang ada, dapat diketahui bahwa ada beberapa hal yang bias ditempuh untuk mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan. Beberapa hal tersebut antara lain: peningkatan SDM, memperkuat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi stakeholder terkait, pemetaan pasar, perubahan pola pikir masyarakat perikanan, pembaharuan teknologi. Selain itu juga perlu adanya pemisahan antara sektor perikanan dan peternakan sehingga pengelolaan bisa optimal.





meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dengan program pengembangan peternakan dan perikanan melalui kegiatan optimalisasi produksi hasil ternak dan optimalisasi produksi hasil perikanan. Meskipun demikian, DPKP Kabupaten Lamongan masih memiliki banyak pekerjaan dalam menyelesaikan kinerja sesuai yang telah direncanakan.

- d. Evaluasi terhadap program/kegiatan dilakukan melalui analisa capaian kinerja sesuai dengan perumusan DPKP Kabupaten Lamongan. Pada tahun anggaran 2007, DPKP Kabupaten Lamongan analisa kinerjanya dikatakan sangat berhasil karena hasil pengukuran ordinalnya mencapai angka 100%. Sejah ini, evaluasi telah dilaksanakan oleh DPKP Kabupaten Lamongan, tetapi belum ada evaluasi langsung yang berasal dari kelompok nelayan/pembudidaya ikan/peternak sebagai yang dalam hal ini adalah obyek pembangunan di bidang perikanan, kelautan dan peternakan.
- e. Dari tabel SWOT dapat diketahui bahwa Kabupaten Lamongan sesungguhnya memiliki potensi yang besar di bidang perikanan, kelautan dan peternakan. Dengan memperhatikan *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threats* (ancaman) maka dapat diambil beberapa strategi yang tepat guna mengoptimalkan potensi yang ada sehingga sektor perikanan dan kelautan bisa menjadi sektor primer yang mampu meningkatkan PAD Lamongan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan Praktek Kerja Lapang yang telah dilaksanakan, maka ada beberapa saran untuk perbaikan Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan, yaitu :

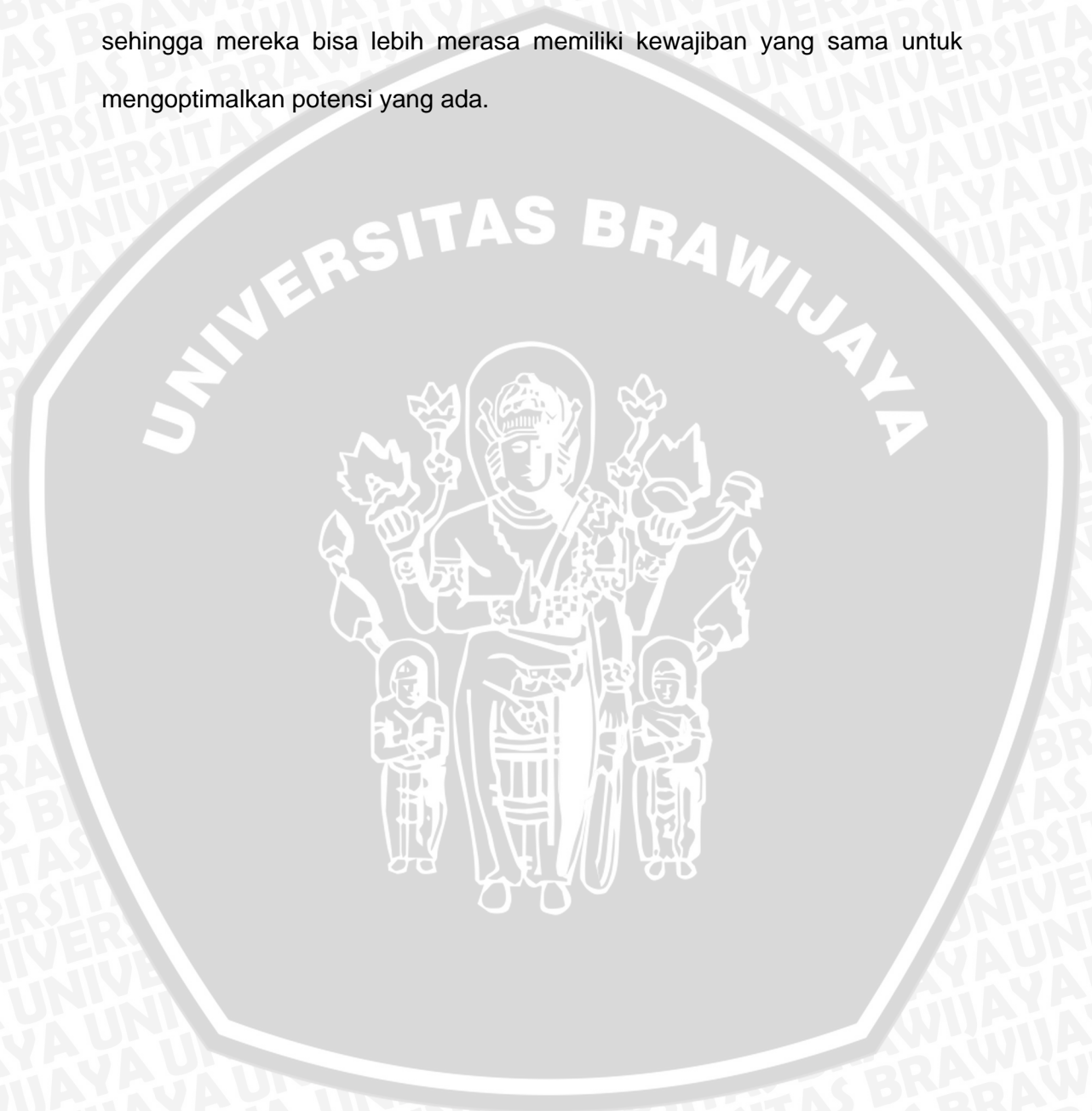
- a. Tingginya potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Lamongan mampu membawa daerah ini menjadi produsen ikan terbesar ketiga di Jawa Timur

setelah daerah Sumenep dan Probolinggo. Di Kabupaten Lamongan sektor perikanan dan kelautan ini juga mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap PAD di banding sektor lain kecuali pangan dan perdagangan. Namun, sampai saat ini kontribusi yang diberikan terus mengalami fluktuasi, salah satunya karena belum ditangani secara optimal. Untuk itulah perlu adanya pengelolaan yang optimal, salah satunya dapat dilakukan melalui pembentukan dinas perikanan dan kelautan secara *independent* atau melalui pemecahan struktur organisasi antara perikanan dan peternakan yang sebenarnya merupakan dua sektor yang berbeda.

- b. Untuk mengoptimalkan potensi perikanan Kabupaten Lamongan perlu adanya suatu program dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki. Keterlibatan seluruh stakeholder terkait mutlak diperlukan dalam perumusan kebijakan/program sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak terkesan *top-down*. Disamping itu, masyarakat (nelayan dan pembudidaya) tidak hanya menjadi obyek tetapi juga subyek dalam pembangunan perikanan di daerahnya.
- c. Memperkuat koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan program kerja agar program kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan dan tidak terjadi *misscommunication* sehingga menghambat jalannya kegiatan.
- d. Perlu adanya penambahan atau peningkatan sumber daya manusia bagi personil dinas sesuai bidang keilmuan sehingga potensi daerah dapat dioptimalkan atau pembagian tugas sehingga antara sektor perikanan dan peternakan tidak tercampur yang akhirnya membuat pengelolaan perikanan dan peternakan tidak maksimal.
- e. Memberdayakan kelompok nelayan/pembudidaya ikan/peternak yang sudah ada di masing-masing daerah sehingga bisa lebih mandiri dalam mengelola

usahanya. Mengenai cara pemberdayaan ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

- f. Perlu pula melibatkan kelompok nelayan/petani ikan/peternak dalam setiap proses/siklus kebijakan, termasuk dalam hal evaluasi program/kegiatan sehingga mereka bisa lebih merasa memiliki kewajiban yang sama untuk mengoptimalkan potensi yang ada.



Patilima, Hamid. 2005. **Metode Penelitian Kualitatif**. CV Alfabeta. Bandung.

Pemerintah Kabupaten Lamongan. 2008. **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2007 Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan**. Pemerintah Kabupaten Lamongan. Lamongan.

Rangkuti, Freddy. 2004. **Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21**. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Sadjad, S. 2002. **Agribisnis yang Membumi**. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

Somantri, Ating dan Muhidin, S.A. 2006. **Aplikasi Statistika dalam Penelitian**. CV Pustaka Setia. Bandung.

Yani, E.I. 2007. **Kebijakan Pembangunan Perikanan sebagai Buku Ajar di Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya, Malang**.

